



BANK INDONESIA

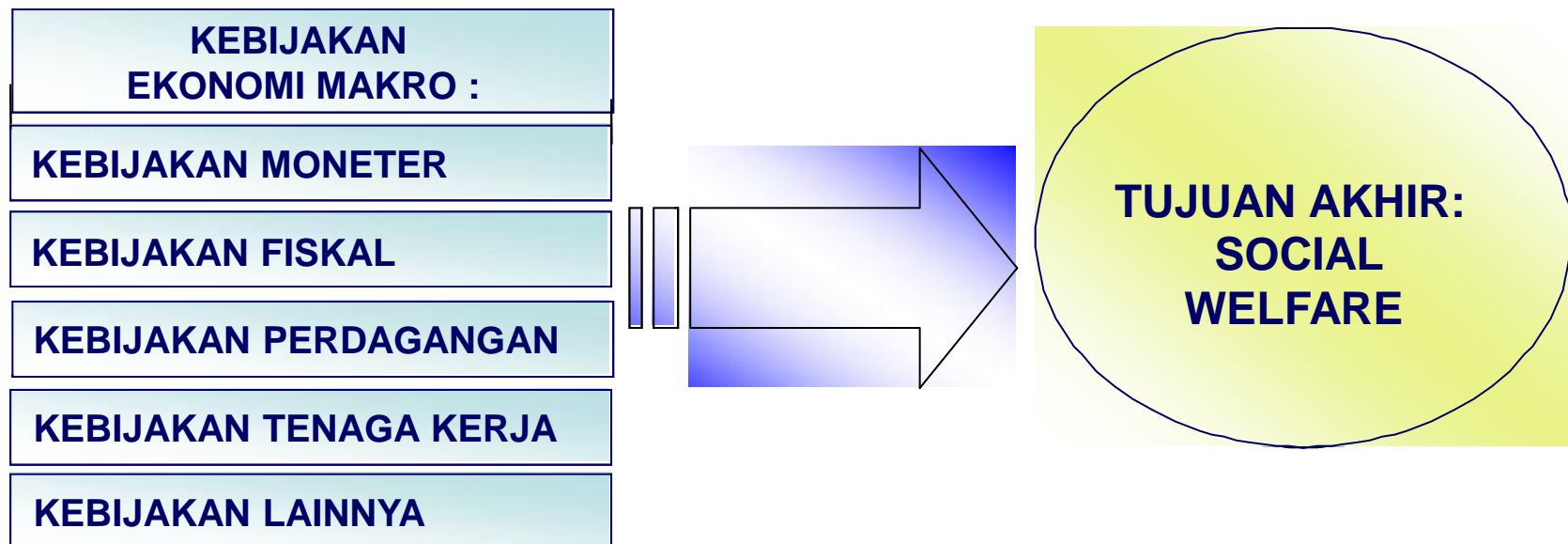
KEBIJAKAN MONETER, NILAI TUKAR, DAN DEVISA DI INDONESIA

POKOK BAHASAN

- Kebijakan Moneter di Indonesia
- Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa

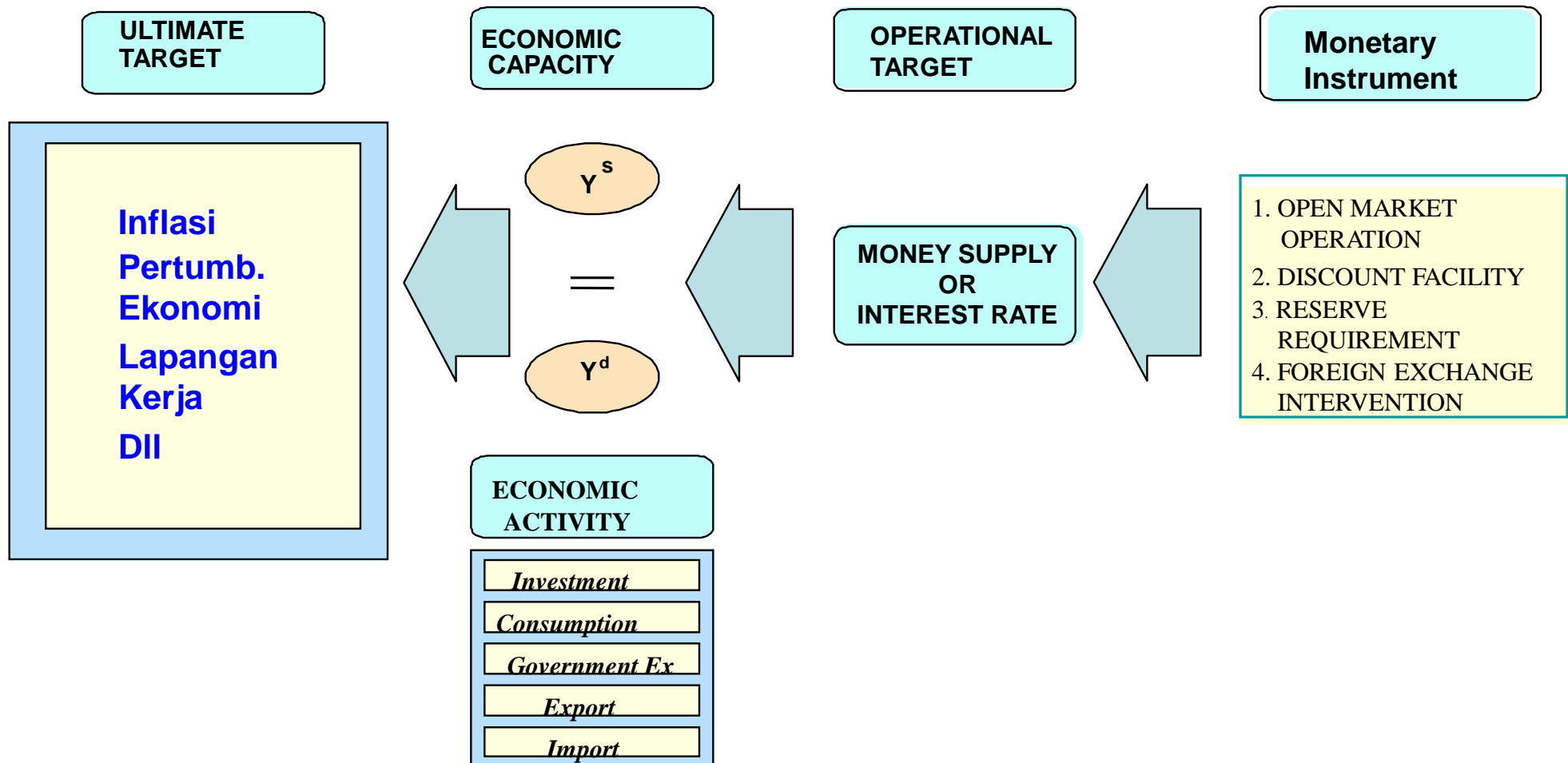
Kebijakan Moneter di Indonesia

- ❖ Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro.
- ❖ Tujuan kebijakan ekonomi makro umumnya adalah mencapai kemakmuran masyarakat (*social welfare*)



Kebijakan Moneter di Indonesia

Kerangka Operasi Kebijakan Moneter



Kebijakan Moneter di Indonesia

Peran penting dari kebijakan moneter sebagai salah satu kebijakan ekonomi;

→ Mempengaruhi :

- a. stabilitas harga
- b. pertumbuhan ekonomi
- c. perluasan kesempatan kerja
- d. keseimbangan neraca pembayaran

→ (a) – (d) menjadi sasaran akhir (*objectives / final targets*) kebijakan moneter

Konflik pencapaian sasaran kebijakan :

- Secara ideal, semua sasaran akhir tersebut (*multiple objectives*) di atas dapat dicapai secara bersamaan. Namun, seringkali pencapaian sasaran-sasaran akhir tsb. mengandung unsur-unsur yang kontradiktif.
- Misalnya: usaha untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja pada umumnya, dapat berdampak negatif terhadap kestabilan harga dan keseimbangan neraca pembayaran.
- Dalam perkembangannya, dewasa ini semakin disadari bahwa kebijakan moneter semestinya lebih memfokuskan pada sasaran tunggal.

Kebijakan Moneter di Indonesia

Kebijakan Moneter dengan Sasaran Tunggal

Sejalan dengan perkembangan ekonomi di dunia, Indonesia menganut hal yang sama dengan menetapkan stabilisasi harga sebagai sasaran tunggal sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Bank Indonesia (UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia – di amandemen UU No. 3 tahun 2004).

Tujuan Bank Indonesia adalah:

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah” (Ps. 7)

3 Pilar pencapaian tujuan

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai **tugas**: (Ps. 8)

- a. *Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter*
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Mengatur dan mengawasi Bank

Perumusan Kebijakan Moneter

Proses perumusan kebijakan moneter

- Pada setiap awal tahun (minggu I Januari) dilakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) untuk:
 1. Evaluasi kebijakan moneter pada tahun sebelumnya
 2. Penentuan sasaran inflasi serta arah kebijakan dan sasaran kebijakan moneter pada tahun yang akan datang.
- Pada setiap triwulan diadakan RDG triwulanan (awal April, Juli, Oktober, Januari) untuk menetapkan arah dan sasaran kebijakan moneter triwulanan.
- Pada setiap bulanan diadakan RDG bulanan untuk menetapkan sasaran kebijakan dan pedoman operasi moneter bulan ybs.
- Pada setiap minggu diadakan RDG mingguan untuk menetapkan operasi moneter pada minggu ybs.

Proses Perumusan Kebijakan Moneter

Rapat Dewan Gubernur (RDG)

- ✓ Perumusan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilakukan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG). Rapat ini dilakukan satu kali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum bidang moneter. Sementara, rapat sejenis juga dilakukan satu kali dalam seminggu untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan moneter yang telah dilakukan.
- ✓ RDG bulanan dapat dihadiri oleh menteri kabinet atau wakil pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara. Tujuannya adalah untuk mempererat koordinasi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan makro ekonomi lainnya.
- ✓ RDG dapat dikategorikan menurut waktu pelaksanaannya menjadi RDG bulanan awal tahun, RDG triwulanan, RDG bulanan, dan RDG mingguan.

Proses Perumusan Kebijakan Moneter

RDG Bulanan Awal Tahun

- ✓ RDG bulanan awal tahun dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, dan sistem pembayaran selama satu tahun yang lalu dan prospeknya ke depan.
- ✓ Telaah mengenai prospek ekonomi makro dan moneter ke depan dimaksudkan terutama dilakukan untuk menetapkan arah dan sasaran kebijakan moneter untuk satu tahun ke depan sesuai dengan sasaran inflasi yang ditetapkan.
- ✓ RDG ini jg sekaligus untuk membahas dan mensahkan laporan tertulis yang akan disampaikan kpd DPR dan Pemerintah. Laporan ini memuat: (1) pelaksanaan tugas & wewenang BI thn sebelumnya, (2) rencana kebijakan, penetapan sasaran, dan langkah2 pelaksanaan tugas & wewenang BI utk tahun y.a.d. dgn memperhatikan perkembangan laju inflasi & kondisi ekonomi dan keuangan.

Proses Perumusan Kebijakan Moneter

RDG Triwulanan

- ✓ Dilaksanakan awal April, Juli, Oktober, dan Januari.
- ✓ RDG ini dilaksanakan untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi, moneter, perbankan, dan sistem pembayaran selama satu triwulan yg lalu dan prospeknya utk periode ke depan.
- ✓ Telaah mengenai prospek ekonomi ke depan terutama dilakukan untuk menentukan apakah *sasaran inflasi* yang telah ditetapkan masih dalam batas kisaran yang aman, serta untuk menetapkan arah dan sasaran kebijakan moneter untuk satu triwulan ke depan.
- ✓ RDG ini dimaksudkan juga untuk membahas dan mensahkan laporan triwulanan tertulis tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BI yg akan disampaikan kpd DPR dan pemerintah.

Proses Perumusan Kebijakan Moneter

RDG Bulanan

- ✓ RDG bulanan dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi perkembangan inflasi, nilai tukar, moneter, dan perbankan.
- ✓ Lebih diarahkan utk memantau pencapaian target inflasi & arah kebijakan satu bulan berikutnya.
- ✓ Dibahas jg pencapaian target operasional (uang primer & suku bunga) utk diputuskan langkah pengendalian moneter satu bulan yang akan datang, seperti OPT, sterilisasi/ intervensi di pasar valas, dan arah suku bunga yg wajar.
- ✓ Keputusan kebijakan moneter dalam RDG bulanan ini disampaikan ke masyarakat melalui siaran pers.

Proses Perumusan Kebijakan Moneter

RDG Mingguan

- ✓ RDG mingguan dilaksanakan atas dasar arahan dari RDG bulanan.
- ✓ RDG mingguan dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pengendalian moneter pada minggu sebelumnya.
- ✓ Arahan pelaksanaan OPT, sterilisasi/ intervensi di pasar valas, serta arah suku bunga di minggu mendatang.
- ✓ Keputusan pengendalian moneter dalam bentuk OPT melalui lelang SBI dalam RDG mingguan ini disampaikan ke masyarakat melalui siaran pers.

Proses Perumusan Kebijakan Moneter

Laporan-Laporan

- ✓ Laporan tahunan dan triwulanan BI dievaluasi oleh DPR. Laporan ini digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Dewan Gubernur dan BI secara keseluruhan.
- ✓ Laporan tahunan ke DPR dalam rangka akuntabilitas, sedangkan laporan tahunan ke pemerintah dalam rangka informasi.
- ✓ Laporan tahunan ke masyarakat melalui media massa dalam rangka informasi, cerminan transparansi, dan pemberitahuan arah kebijakan moneter.

POKOK BAHASAN

Kebijakan Moneter di Indonesia

Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa

Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa

Tujuan Kebijakan Nilai tukar dan Devisa

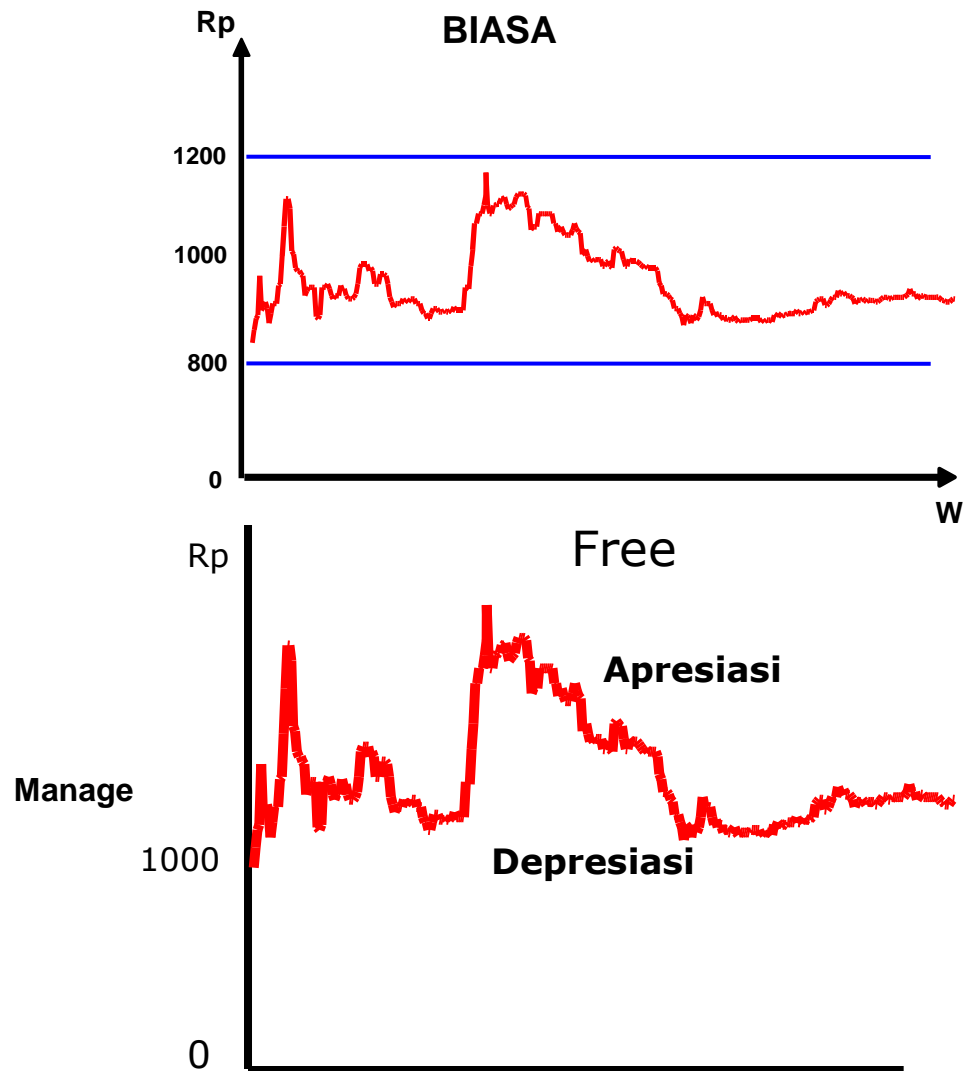
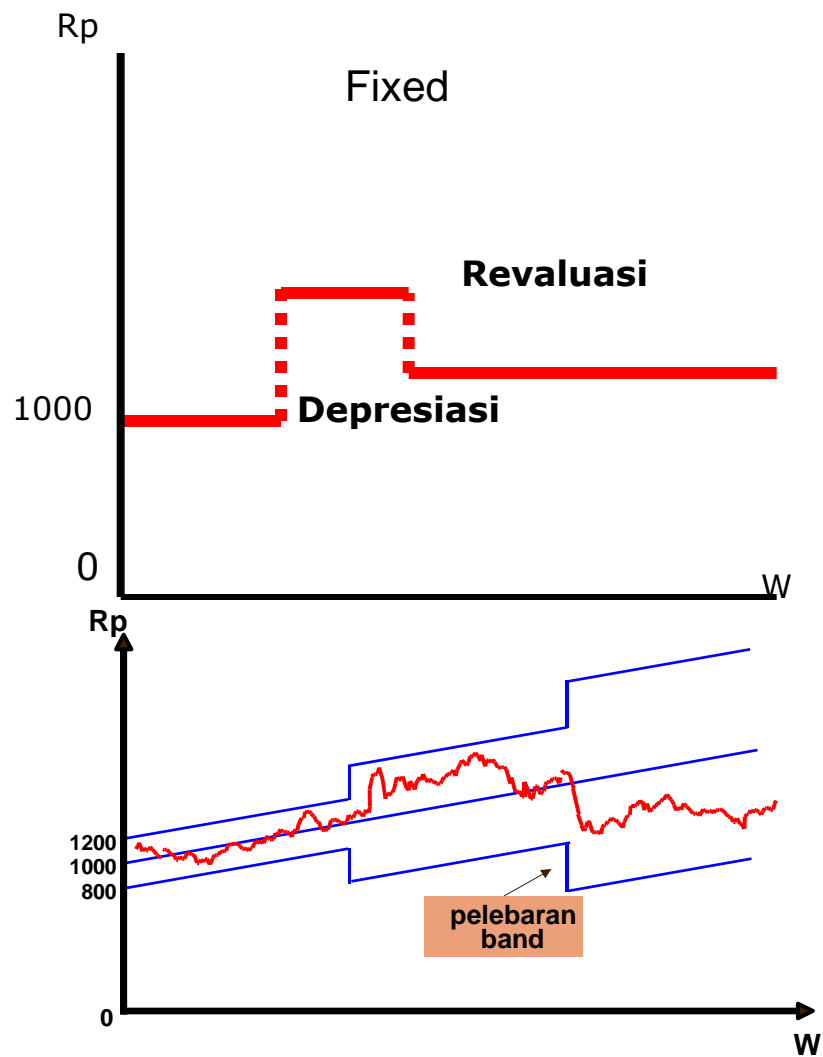
- Mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan
- Mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter

Wewenang BI atas Cadangan Devisa

- Pengelolaan Cadangan Devisa
- Pengembangan Pasar Valuta Asing
- Pengelolaan Nilai Tukar

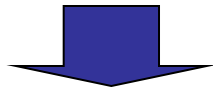
Sistem Nilai Tukar dan Lalu Lintas Devisa diatur dalam UU No. 24 tahun 1999 – tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Sistem Nilai Tukar

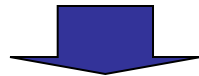


Sejarah Sistem Nilai Tukar

Sistem Nilai Tukar Tetap
(1971 – Maret 1983)



Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali
scr ketat
(April 1983 – Sep 1986)



Sistem Nilai Tukar Mengambang Fleksible
(Sep. 1986 – Agt. 1997)



Sistem Nilai Tukar Mengambang bebas
(14 Agustus 1997)

Bank Sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai “*anchor*”. Dalam sistem ini, *excess demand* dan *supply* akan dipenuhi/diserap oleh Bank Indonesia melalui intervensi.

Nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur “*managed*” dari bank Sentral melalui intervensi.

Nilai tukar dibiarkan bebas, tergantung pada mekanisme pasar.

Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar

Periode Nilai Tukar Mengambang Ketat

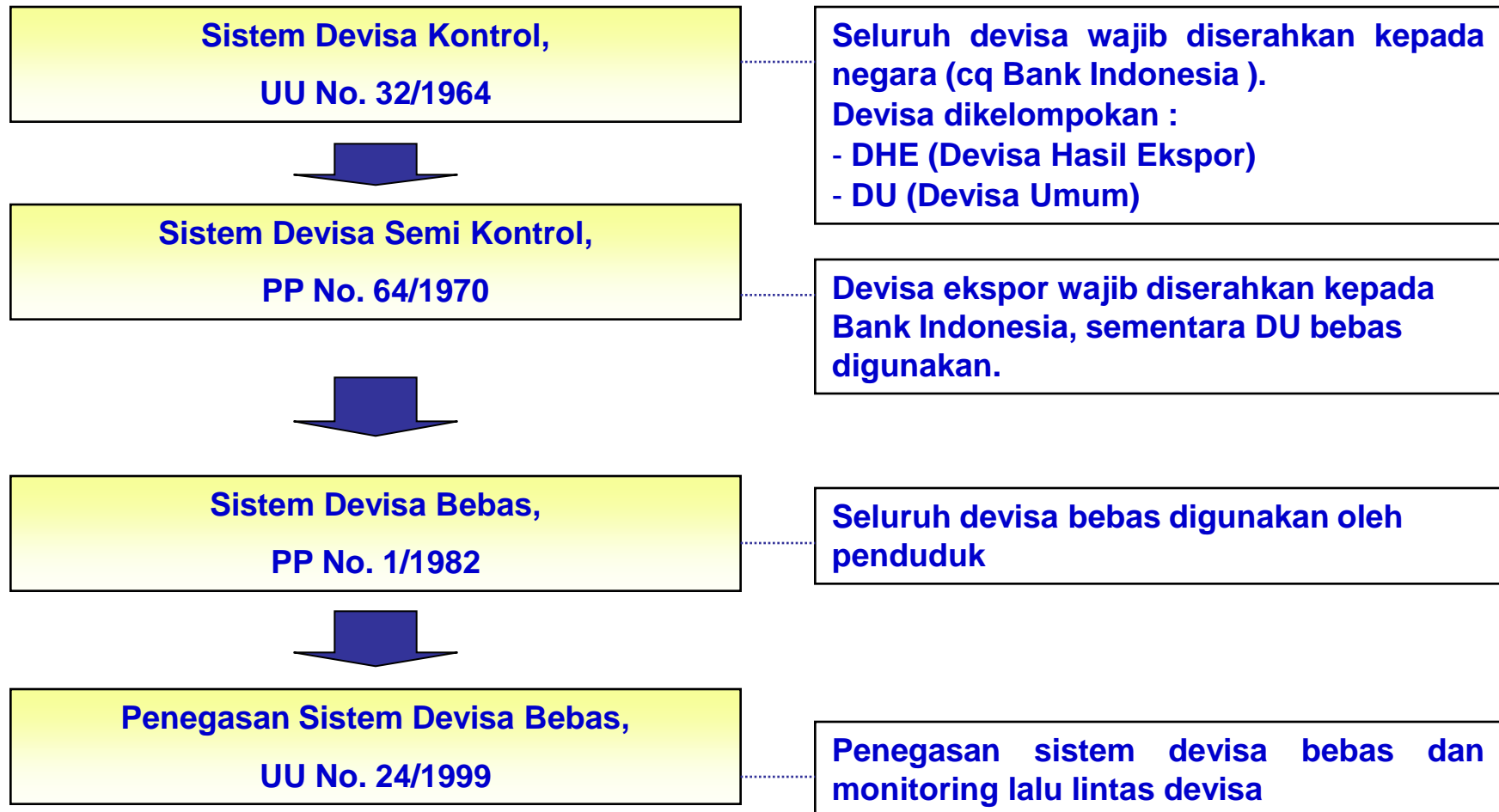
- Nopember 1978 dari Rp425 per dolar menjadi Rp625 per dolar
- Maret 1983 dari Rp625 per dolar menjadi Rp825 per dolar
- September 1986 dari Rp1134 per dolar menjadi Rp1644 per dolar

Periode Nilai Tukar mengambang Flexible

Bank Indonesia melakukan 8 x pelebaran pita intervensi yaitu

- September 1992 dari Rp6 (0,25%) menjadi Rp10(0,50%)
- Januari 1994 dari Rp10 (0,50%) menjadi Rp20 (1%)
- September 1994 dari Rp20 (1%) menjadi Rp30 (1,5%)
- Mei 1995 dari Rp30 (1,5%) menjadi Rp44 (2%)
- Desember 1995 dari Rp44 (2%) menjadi Rp66 (3%)
- Juni 1996 dari Rp66 (3%) menjadi Rp118 (5%)
- September 1996 dari Rp118 (5%) menjadi Rp192 (8%)
- Juli 1997 dari Rp192 (8%) menjadi Rp304 (12%)
- Selain itu dalam periode nilai tukar mengambang flexible ini Bank Indonesia
- Setiap hari mengeluarkan nilai tukar (kurs) tengah harian
- Melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga agar nilai tukar bergerak dalam koridor yang telah ditetapkan.

Sejarah Sistem Devisa



Hal penting menurut UU No. 24/ 1999

Pasal 2

- ♦ **Ayat (1), Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa.**
- ♦ **Ayat (2), Penggunaan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan transaksi di dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU tentang Bank Indonesia.**

Pasal 3

- ♦ **Ayat (1), BI berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan oleh penduduk.**
- ♦ **Ayat (2), Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh BI.**

Pasal 4

- ♦ **Ayat (1), Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh Bank.**
- ♦ **Ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.**

Wewenang BI atas Cadangan Devisa

Pengelolaan Cadangan Devisa :

- ☛ Pengelolaan dilakukan dengan diversifikasi menurut jenis valuta dan jenis penempatan.
- ☛ Pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip keamanan dan kesiagaan untuk memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip pendapatan yang optimal.

Pengembangan Pasar Valuta Asing

Melalui penyempurnaan berbagai ketentuan di bidang transaksi devisa, yaitu :

- Menetapkan ketentuan transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka menetapkan prinsip kehati-hatian :
 - a. Ketentuan mengenai Transaksi Derivatif
 - b. Pembatasan Transaksi rupiah dan pemberian kredit valas

Pengelolaan Nilai Tukar

et Sterilisasi/ Intervensi di pasar valuta asing.

et Penentuan Kurs Jual/ beli yang terdiri dari;

- ☺ Kurs Transaksi
- ☺ Kurs Uang Kertas Asing.

Kebijakan BI terhadap Nilai Tukar

- ☯ Menjaga kondisi fundamental makro ekonomi yang sehat.
- ☯ Melakukan intervensi ke pasar valas.
- ☯ Pengawasan langsung pada bank pelaku terbesar.
- ☯ Pemantauan rekening vostro.
- ☯ Non-internasionalisasi Rupiah, dengan membatasi akses non residen terhadap rupiah untuk menekan tindakan spekulasi



Terima Kasih